

BPKH *News*



**Bukti Transparansi Dana Haji:
BPKH Raih WTP 7 Kali**

Haji Makin Transparan Dan Mudah

Kamu udah download
BPKH Apps belum?



Cek saldo dan pertumbuhan nilai
manfaat kamu hanya di **BPKH Apps!**



PELINDUNG

Fadlul Imansyah,
Kepala Badan Pelaksana BPKH RI
Ahmad Zaky,
Sekretaris Badan BPKH RI

PENANGGUNG JAWAB

Demmy R Budiawan,
Kepala Divisi Komunikasi Strategis
Kantor BPKH RI

PEMIMPIN REDAKSI

Ricki Syahroni Putra,
Manajer Komunikasi Strategis BPKH RI

STAF REDAKSI

Yusuf Kadhafi

ALAMAT REDAKSI

Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18,
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, BPKH News kembali hadir dengan berbagai informasi terbaru seputar kinerja, capaian, dan dinamika Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Edisi kali ini menyoroti sejumlah capaian penting yang menjadi bukti komitmen BPKH dalam mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Di antaranya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ketujuh kalinya, yang menegaskan konsistensi BPKH dalam tata kelola keuangan yang akuntabel.

Tidak hanya itu, kami juga mengulas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPKH Limited, yang menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi investasi guna memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah.

Semarak peringatan HUT Ke-70 Republik Indonesia turut menghiasi momen kebersamaan insan BPKH dalam memupuk semangat nasionalisme sekaligus meneguhkan dedikasi dalam memberikan layanan terbaik.

Hingga Juli 2025, BPKH berhasil mengelola dana haji sebesar Rp170 triliun dengan prinsip kehati-hatian, memastikan seluruhnya aman dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Tidak ketinggalan, kami bangga menyampaikan berbagai penghargaan bergengsi yang berhasil diraih, baik di tingkat lembaga maupun individu, sebagai apresiasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran.

Semoga sajian dalam edisi ini memberikan inspirasi dan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap peran BPKH sebagai pengelola dana umat yang amanah dan profesional.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,



8

TUJUH KALI BERTURUT RAIH WTP BPK

Capaian ini bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan dana haji terus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan syariah yang kuat.



11

MENJAGA AMANAH, MENGUATKAN KEPERCAYAAN



BPKH CATATKAN LABA 15,5 MILIAR DI 2024

BPKH USULKAN REVISI UU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

2



BPKH DAN PP MUHAMMADIYAH TEKEN MOU PENGUATAN PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT



3

BPKH GANDENG 'AISYIYAH PERKUAT LITERASI KEUANGAN HAJI YANG TRANSPARAN DAN SYARIAH

4



DANA HAJI: TETAP DI BPKH, PERKUAT TRANSPARANSI DAN KELEMBAGAAN



17

BPKH SALURKAN NILAI MANFAAT 2025: RP2,1 TRILIUN UNTUK 5,4 JUTA JEMAAH HAJI TUNGGU

19



21

**SEMARAK
KEMERDEKAAN HUT
KE-80 RI DI BPKH**



25

**KELOLA DANA HAJI RP170
TRILIUN, BPKH TEGASKAN
AMAN DAN TRANSPARAN**



27

**BPKH DUKUNG PEMBANGUNAN
ASRAMA PESANTREN DI
BANDUNG LEWAT PROGRAM
KEMASLAHATAN UMAT**



**BPKH DAN BAZNAS RESMIKAN
GEDUNG SERBAGUNA UNTUK
PONPES ASSYAFI'YAH
MAJALENGKA**

28



29

**BPKH DAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET (UNS) PERKUAT
EKONOMI SYARIAH NASIONAL**



31

**KIPRAH PEREMPUAN
UNTUK KEUANGAN SYARIAH
BERKELANJUTAN**

**PESONA TIGA MASJID
IKONIK NUSANTARA**

33



CATATKAN LABA 15,5 MILIAR DI 2024

BPKH Limited Siap Fokus Optimalkan Potensi Ekosistem Haji dan Umrah

Entitas bisnis milik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BPKH Limited mencatatkan laba bersih sebesar 3,6 juta riyal Saudi atau setara Rp15,5 miliar dari modal disetor sebesar 50,01 juta riyal Saudi yang diterima penuh pada kuartal II 2024.

Entitas bisnis milik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BPKH Limited mencatatkan laba bersih sebesar 3,6 juta riyal Saudi atau setara Rp15,5 miliar dari modal disetor sebesar 50,01 juta riyal Saudi yang diterima penuh pada kuartal II 2024. Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengapresiasi BPKH Limited yang sudah mampu menghasilkan laba. “Perusahaan yang baru berusia dua tahun ini layak diapresiasi karena telah mampu menghasilkan laba dan menyetorkan dividen dari laba bersihnya sebagai Nilai Manfaat Keuangan Haji kepada BPKH,” kata Fadlul dalam keterangannya, Selasa (1/7).

Hal itu disampaikan Fadlul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BPKH Limited untuk Tahun Buku 2024 di Jakarta.

Turut diketahui bahwa BPKH Limited merupakan entitas bisnis milik penuh BPKH yang berbasis di Arab Saudi. Pada musim haji 2025 mereka menyediakan bumbu khas Nusantara serta makanan siap saji untuk jamaah haji Indonesia. Adapun RUPS itu mengagendakan beberapa keputusan penting, antara lain persetujuan atas laporan pengelolaan dan laporan keuangan tahun buku 2024.

Dalam laporannya, Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, *Return on Equity* (ROE) pihaknya mencapai 9,98 persen, dalam mata uang riyal Saudi jauh melampaui imbal hasil dari instrumen keuangan konvensional. “Nilai manfaat yang dihasilkan BPKH Limited dalam mata uang Saudi Riyal (SAR) juga sebagai bagian dari mitigasi risiko pasar keuangan haji sehingga *matching* dengan kewajiban Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Haji (BPIH) yang didominasi mata uang SAR dan USD,” ujar Sidiq. Menurut Sidiq, dengan nilai manfaat tersebut menunjukkan model bisnis dan portfolio bisnis BPKH Limited sudah cukup *proven* sebagai entitas baru di Arab Saudi. “Dengan penuh syukur kami juga melaporkan gross profit yang diperoleh dari bisnis dan investasi di Arab Saudi dibandingkan dengan modal yang disetorkan BPKH mencapai 18,37 persen,” ujarnya. Sementara itu, Anggota BP BPKH, Sulityowati mendukung untuk BPKH Limited terus menegaskan perannya sebagai kendaraan strategis investasi langsung keuangan haji di Tanah Suci.

“Semoga BPKH Limited tetap fokus mengoptimalkan potensi ekosistem haji dan umrah, demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia dan negara-negara Islam lainnya,” ujar Sulityowati.

BPKH USULKAN REVISI UU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.

Hal ini penting sebagai langkah untuk mengoptimalkan nilai manfaat yang diperoleh. Hal itu disampaikan Anggota Badan

Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira lewat siaran Kompas TV sebagaimana dikutip dari Instagram BPKH pada Selasa (8/7/2025).

“Melalui tata kelola yang profesional dan modern, BPKH bertanggung jawab tidak hanya menjaga dana itu aman tetapi juga mengoptimalkan nilai manfaatnya baik untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah,” ujarnya.

Selama ini sumber dana BPKH masih hanya terpaku pada setoran jamaah tanpa cadangan kerugian sehingga menyulitkan BPKH berinvestasi dengan optimal.

Cadangan atau modal ini yang tidak dimiliki oleh BPKH salah satunya ya sehingga kami dalam undang-undang yang nanti direvisi pun berusaha supaya bisa dibentuk modal atau cadangan



modal sejenis itu ya,” katanya.

Usulan BPKH untuk melakukan revisi UU No. 34 Tahun 2014 itu sebagai upaya agar pengelolaan dana haji semakin optimal, adaptif, dan mampu memberikan nilai manfaat lebih besar bagi jamaah dan umat.

Dilansir dari BPKH, bahwa revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 memiliki tiga tujuan, yaitu (1) memperkuat kelembagaan BPKH; (2) memperluas ruang investasi syariah; dan (3) meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan haji.

“Demi menciptakan pelayanan haji yang lebih baik dan pengelolaan keuangan haji yang amanah dan berkelanjutan,” demikian keterangan BPKH melalui laman media sosialnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2014, disebutkan dalam Pasal 2, bahwa pengelolaan keuangan

haji berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan haji pada pasal 3 UU yang sama disebutkan bertujuan untuk meningkatkan tiga hal, yakni (1) kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; (2)

rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan (3) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

BPKH DAN PP MUHAMMADIYAH TEKEN MOU PENGUATAN PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat untuk program-program kemaslahatan.

Penandatanganan berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta dengan dihadiri langsung oleh Kepala BPKH Fadlul Imansyah dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Kerja sama ini bertujuan untuk mengakselerasi program-program strategis yang berdampak langsung kepada umat, khususnya

dalam bidang pendidikan dan berbasis nilai-nilai Islam.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya BPKH memperluas kemitraan strategis dengan organisasi keumatan yang kredibel dan memiliki jaringan akar rumput yang kuat.

“Kami memandang Muhammadiyah sebagai mitra strategis yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan amal usaha dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa dana umat yang kami kelola benar-benar kembali kepada umat dalam

bentuk program yang konkret, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Fadlul, Senin (4/8/2025).

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya revitalisasi program keumatan yang punya pijakan dan orientasi di komunitas untuk pemberdayaan umat.

“Perlu ada implementasi dan langkah-langkah nyata setelah ditandatanganinya MoU,” ujar Haedar.

Nota Kesepahaman ini menjadi titik awal penyusunan program bersama antara BPKH dan Muhammadiyah, termasuk potensi realisasi proyek-proyek kemaslahatan di bidang pendidikan serta pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Acara ini juga dihadiri Anggota Badan Pelaksana Sulistyowati, Amri Yusuf serta Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, dan Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbayinah.

BPKH terus membuka peluang kemitraan dengan lembaga-lembaga keumatan untuk memastikan tata kelola dana haji dan Dana Abadi Umat berlangsung secara transparan, profesional, dan amanah.



BPKH GANDENG 'AISYIYAH PERKUAT LITERASI KEUANGAN HAJI YANG TRANSPARAN DAN SYARIAH

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Tabligh dan Ketarjihan (MTK PP 'Aisyiyah) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Seminar Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Haji untuk Umat di SM Tower and Convention, Kamis (31/7). Acara ini diikuti 150 mubalighat 'Aisyiyah dari DIY dan sekitarnya.

Sulistiyowati, anggota Badan Pelaksana BPKH, menegaskan

bahwa mandat utama BPKH adalah mengelola dana haji secara amanah—mulai dari penerimaan, pengembangan, hingga pertanggungjawaban. Hingga akhir Desember 2024, dana kelolaan BPKH mencapai Rp171,65 triliun, atau 101 persen dari target tahun 2024. "Investasi berbasis syariah ini bertujuan merasionalisasi biaya haji agar lebih terjangkau," ujarnya.

Dari perspektif fikih, Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Mohamad Mas'udi, menekankan pentingnya aspek istitha'ah (kemampuan berhaji), baik jasmani, rohani, maupun logistik. Ia mengingatkan BPKH agar memastikan dana yang dikelola benar-benar halal, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola: memangkas birokrasi, menghindari kartel transportasi, dan menerapkan manajemen modern yang transparan.

Kehadiran para mubalighat 'Aisyiyah menegaskan peran penting perempuan dalam literasi keuangan syariah. Seminar ini pun menjadi ruang pertemuan gagasan: bagaimana dana haji yang bernilai triliunan rupiah tak hanya soal angka, melainkan amanah umat yang harus dijaga dengan prinsip syariah, akuntabilitas, dan kemaslahatan.



LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2024

Contact Center BPKH:

bpkh.go.id

NERACA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

NERACA					LAPORAN OPERASIONAL				
Uraian	INDUK		KONSOLIDASI		Uraian	INDUK		KONSOLIDASI	
	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)		31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
ASET					A. DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA DANA				
Kas dan setara kas	10.797	2.349	1.547.024	2.192.816	DANA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PIH)				
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	-	-	2.813.041	5.010.704	Pendapatan setoran jemaah berangkat	12.394.913	10.796.935	12.394.913	10.796.935
Penempatan pada bank	40.761.408	41.628.367	33.756.852	32.847.501	Beban PIH	(19.909.872)	(18.252.268)	(19.909.872)	(18.252.268)
Piutang pembiayaan	-	-	4.078.059	5.469.474	Defisit	(7.514.959)	(7.455.333)	(7.514.959)	(7.455.333)
Pembiayaan bagi hasil	-	-	10.835.989	14.777.116					
Pendapatan yang masih harus diterima	2.025.529	1.931.354	2.004.262	1.916.827	Nilai manfaat dana PIH - bersih	11.239.462	10.676.123	11.239.462	10.676.123
Investasi surat berharga	128.392.451	122.678.026	157.521.773	151.231.350	Penyaluran untuk rekening virtual	(2.299.932)	(3.173.718)	(2.299.932)	(3.173.718)
Uang muka	327.115	-	327.115	-	Beban operasional	(444.559)	(363.178)	(444.559)	(363.178)
Penyertaan saham pada entitas anak	2.096.659	1.859.908	-	-	Beban hibah	(4.732)	-	(4.732)	-
Investasi langsung dan lainnya	388.110	577.793	885.328	900.262	Nilai manfaat tersedia untuk penyelenggaraan ibadah haji	8.490.239	7.139.227	8.490.239	7.139.227
Aset tetap - bersih	21.917	14.295	2.219.569	1.676.028	Surplus (Defisit) Dana PIH	975.280	(316.106)	975.280	(316.106)
Investasi emas	2.365	-	2.365	-					
Aset lainnya	650.426	665.843	5.053.724	4.741.411	Dana Abadi Umat (DAU)				
JUMLAH ASET	174.676.777	169.357.935	221.045.101	220.763.489	Nilai manfaat DAU - bersih	266.128	251.546	266.128	251.546
					Pendapatan lainnya	144	-	144	-
LIABILITAS					Penyaluran program kemasklahatan	(230.267)	(228.582)	(230.267)	(228.582)
Utang jemaah tunda	1.181.938	2.266.955	1.181.938	2.266.955	Surplus Dana DAU	36.005	22.964	36.005	22.964
Utang lainnya	362.169	337.359	1.193.038	1.133.033	Akumulasi Surplus (Defisit)	1.011.285	(293.142)	1.011.285	(293.142)
Dana simpanan nasabah bank	-	-	10.719.054	11.071.088	Pendapatan di Entitas Asosiasi	34.576	11.413	-	-
Dana titipan Jemaah	151.460.417	146.254.833	151.460.417	146.254.833	Pendapatan dan Beban - Lain-Lain bersih	1.355	156	1.355	156
Pinjaman yang diterima	-	-	1.909.965	3.169.678	Surplus (Defisit) Sebelum Pajak Penghasilan	1.047.216	(281.573)	1.012.640	(292.986)
JUMLAH LIABILITAS	153.004.524	148.859.147	166.464.412	163.895.587	Beban pajak penghasilan - induk	(15.407)	(35.790)	(15.407)	(35.790)
					SURPLUS (DEFISIT) DENGAN PEMBATASAN	1.031.809	(317.363)	997.233	(328.776)
DANA SYIRKAH TEMPORER	-	-	32.334.463	35.911.668					
					B. TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA				
ASET NETO					Pendapatan usaha entitas anak	-	-	3.028.042	3.059.093
Aset neto tanpa pembatasan	1.037.272	894.779	1.257.743	984.587	Beban usaha dan operasional entitas anak	-	-	(3.029.766)	(3.063.341)
Aset neto dengan pembatasan	20.634.981	19.604.009	20.566.911	19.570.515	Pendapatan (Beban) lain-lain entitas anak - bersih	-	-	157.340	18.529
Keperluan entitas induk - BPKH	21.672.253	20.498.788	21.824.654	20.555.102	Surplus Sebelum Pajak Penghasilan	-	-	155.616	14.281
Keperluan nonpengendali atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasi	-	-	421.572	401.132	Beban pajak penghasilan - anak	(1.957)	-	(1.957)	(917)
JUMLAH ASET NETO	21.672.253	20.498.788	22.246.226	20.956.234	SURPLUS TANPA PEMBATASAN	-	-	153.659	13.364
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN ASET NETO	174.676.777	169.357.935	221.045.101	220.763.489					
					SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN	1.031.809	(317.363)	1.150.892	(315.412)
					Penghasilan (beban) komprehensif lain	142.493	(280.377)	139.677	(279.314)
					SURPLUS (DEFISIT) KOMPREHENSIF	1.174.302	(597.740)	1.290.569	(594.726)
					Surplus (Defisit) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
					Entitas induk (BPKH)	1.031.809	(317.363)	1.127.636	(317.653)
					Keperluan nonpengendali	-	-	23.255	2.241
						1.031.809	(317.363)	1.150.891	(315.412)
					Penghasilan (Beban) komprehensif lain tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
					Entitas induk (BPKH)	142.493	(280.377)	142.493	(280.377)
					Keperluan nonpengendali	-	-	(2.815)	1.063
						142.493	(280.377)	139.678	(279.314)

Opini
Audit

Opini
Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP) dari BPK

7

tahun
berturut
turut

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2024** telah diaudit oleh BPK RI yang tertuang dalam **Laporan Nomor: 21.c/LHP/XVIII/05/2025 tanggal 10 Mei 2025** dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

LAPORAN KONSOLIDASIAN TAHUN HAJI & ENTITAS ANAK 2024 (AUDITED)



LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	INDUK		KONSOLIDASI	
	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan nilai manfaat	11.638.024	10.910.580	11.638.024	10.910.580
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(8.109.093)	(8.068.845)	(8.109.093)	(8.068.845)
Pengeluaran uang muka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025	(327.115)	-	(327.115)	-
Penerimaan piutang	643.077	214.730	643.077	214.730
Pengeluaran beban pajak nilai manfaat lainnya	(6.136)	(11.234)	(6.136)	(11.234)
Pengeluaran bersih operasional BPKH	(449.339)	(380.026)	(449.339)	(380.026)
Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat islam	(234.345)	(224.343)	(234.345)	(224.343)
Penerimaan (Pengeluaran) kas bersih aktivitas operasi entitas anak	-	-	(1.842.180)	718.378
Lainnya	(36.035)	8.986	(34.929)	11.872
Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	3.119.038	2.449.848	1.277.964	3.171.112
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Pembelian aset tetap	(9.454)	(11.267)	(9.454)	(11.267)
Pembelian aset tak berwujud	(95)	-	(95)	-
Penjualan aset tetap	113	-	113	-
Kenaikan penempatan pada bank	1.219.906	6.906.997	1.219.906	6.906.997
Penempatan investasi	(10.433.301)	(11.214.458)	(10.433.301)	(11.214.458)
Hasil pelepasan dan pencairan investasi	4.632.479	3.559.724	4.632.479	3.559.724
Penerimaan (pengeluaran) kas bersih aktivitas investasi entitas anak	-	-	(296.176)	(7.530.370)
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(4.590.352)	(759.004)	(4.886.528)	(8.289.374)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Penerimaan setoran Jemaah	19.348.678	13.661.226	19.348.678	13.661.226
Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH	(2.084.417)	(2.398.989)	(2.084.417)	(2.398.989)
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari setoran jamaah	(12.394.913)	(10.796.935)	(12.394.913)	(10.796.935)
Pengeluaran untuk pengembalian kepada PIHK	(3.389.586)	(2.155.115)	(3.389.586)	(2.155.115)
Penerimaan kas bersih aktivitas pendanaan entitas anak	-	-	(714.653)	5.552.937
Kas Bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	1.479.762	(1.689.813)	765.109	3.863.124
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	8.448	1.031	(2.843.455)	(1.255.138)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	2.349	1.318	7.203.520	8.458.658
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	10.797	2.349	4.360.065	7.203.520
Kas dan Setara Kas Akhir Periode Terdiri dari:				
Kas dan setara kas	10.797	2.349	1.547.024	2.192.816
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	-	-	2.813.041	5.010.704
Total	10.797	2.349	4.360.065	7.203.520

NERACA DANA ABADI UMAT PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset		
Giro BTN Operasional Kemaslahatan	10.555	1.880
Piutang	1.000	3.510
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	27.549	27.128
Penempatan	399.994	482.310
Investasi Surat Berharga	3.456.890	3.337.245
Investasi pada entitas anak	3.729	3.729
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	25.000	25.000
Total Aset	3.924.717	3.880.802
Liabilitas		
Utang Beban Kemaslahatan	5.751	8.832
Utang Lain-Lain	15.177	15.338
Subtotal Liabilitas	20.928	24.170
Aset Neto		
Aset Neto Dengan Pembatasan	3.903.789	3.856.632
Subtotal Aset Neto	3.903.789	3.856.632
Total Liabilitas dan Aset Neto	3.924.717	3.880.802

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO DANA ABADI UMAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Saldo awal Aset Dengan Pembatasan DAU	3.856.632	3.832.715
Koreksi saldo Awal	11.152	953
Surplus	36.005	22.964
Saldo akhir Aset Dengan Pembatasan DAU	3.903.789	3.856.632

Penyaluran Program Kemaslahatan (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Pendidikan dan Dakwah	60.138	49.442
Sosial Keagamaan	80.280	87.789
Pelayanan Ibadah haji	5.476	29.220
Kesehatan	32.872	14.702
Sarana dan Prasarana Ibadah	24.209	23.359
Ekonomi Umat	19.003	23.171
Tanggap Bencana	8.289	899
Jumlah Penyaluran Program Kemaslahatan	230.267	228.582

LAPORAN OPERASIONAL DANA ABADI UMAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Pendapatan nilai manfaat - penempatan	22.678	25.653
Pendapatan nilai manfaat - investasi	243.450	225.893
Jumlah Pendapatan Nilai Manfaat	266.128	251.546
Pendapatan Lainnya	144	0
Jumlah Pendapatan Lainnya	144	0
Penyaluran Program Kemaslahatan	(230.267)	(228.582)
Surplus/(Defisit) DAU	36.005	22.964

Nilai Tukar mata uang asing pada tanggal **31 Desember 2024**



1 SAR
Rp4.304,14



1 USD
Rp16.162,00

Penyajian laporan keuangan publikasi ini bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKH dan diterbitkan guna memenuhi ketentuan **Pasal 52 ayat 8 Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.**

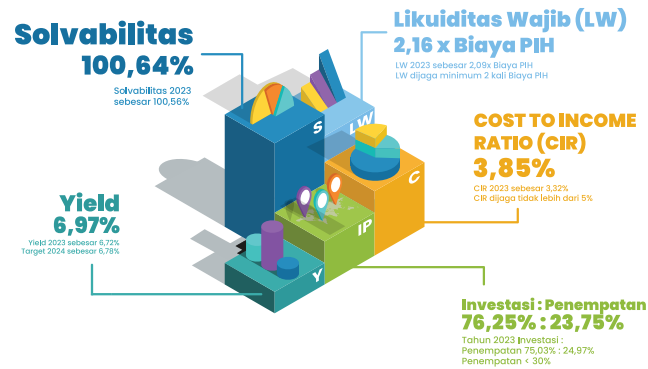
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI & ENTITAS ANAK TAHUN 2024 (AUDITED)

Contact Center BPKH:
bpkh.go.id

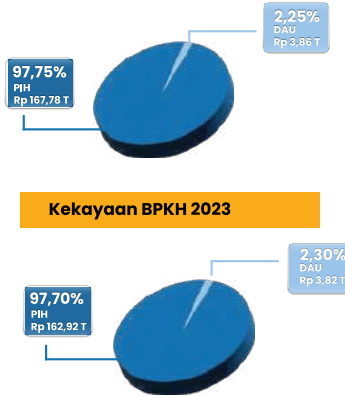
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	INDUK					KONSOLIDASI				
	Kepentingan Entitas Induk - BPKH					Kepentingan Entitas Induk - BPKH				
	Aset Neto Dengan Pembatasan	Aset Neto Tanpa Pembatasan	Jumlah	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah	Aset Neto Dengan Pembatasan	Aset Neto Tanpa Pembatasan	Jumlah	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah
Saldo Aset Neto pada 31 Desember 2022 (Audited)	19.912.397	1.175.156	21.087.553	-	21.087.553	19.890.316	1.253.841	21.144.157	398.694	21.542.851
Defisit tahun berjalan - PIH	(340.327)	-	(340.327)	-	(340.327)	(351.740)	-	(351.740)	-	(351.740)
Surplus tahun berjalan - DAU	22.964	-	22.964	-	22.964	22.964	-	22.964	-	22.964
Surplus entitas anak	-	-	-	-	-	-	11.123	11.123	2.241	13.364
Surplus (Defisit) komprehensif tahun berjalan	-	(280.377)	(280.377)	-	(280.377)	-	(280.377)	(280.377)	1.063	(279.314)
Sub jumlah	(317.363)	(280.377)	(597.740)	-	(597.740)	(328.776)	(269.254)	(598.030)	3.304	(594.726)
Koreksi aset neto - PIH	8.022	-	8.022	-	8.022	8.022	-	8.022	-	8.022
Koreksi aset neto - DAU	953	-	953	-	953	953	-	953	-	953
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(866)	(866)
Saldo Aset Neto pada 31 Desember 2023 (Audited)	19.604.009	894.779	20.498.788	-	20.498.788	19.570.515	984.587	20.555.102	401.132	20.956.234
Surplus tahun berjalan - PIH	995.804	-	995.804	-	995.804	961.228	-	961.228	-	961.228
Surplus tahun berjalan - DAU	36.005	-	36.005	-	36.005	36.005	-	36.005	-	36.005
Surplus entitas anak	-	-	-	-	-	-	130.404	130.404	23.255	153.659
Surplus (Defisit) komprehensif tahun berjalan	-	142.493	142.493	-	142.493	-	142.493	142.493	(2.815)	139.678
Sub jumlah	1.031.809	142.493	1.174.302	-	1.174.302	997.233	272.897	1.270.130	20.440	1.290.570
Koreksi aset neto - PIH	(11.988)	-	(11.988)	-	(11.988)	(11.988)	-	(11.988)	-	(11.988)
Koreksi aset neto - DAU	11.152	-	11.152	-	11.152	11.151	-	11.151	-	11.151
Koreksi saldo laba entitas anak	-	-	-	-	-	-	4.985	4.985	989	5.974
Koreksi saldo komprehensif anak	-	-	-	-	-	-	(4.726)	(4.726)	(989)	(5.715)
Saldo Aset Neto pada 31 Desember 2024 (Audited)	20.634.981	1.037.272	21.672.253	-	21.672.253	20.566.911	1.257.743	21.824.654	421.572	22.246.226

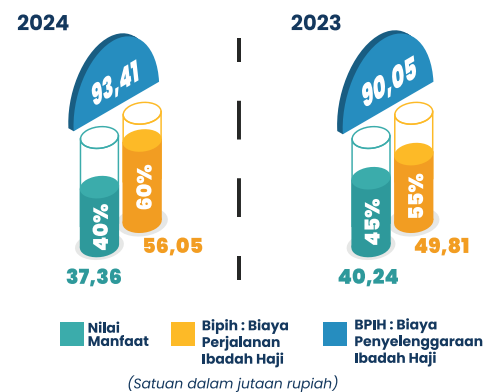
Rasio Keuangan BPKH 2024



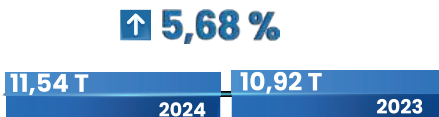
Kekayaan BPKH 2024



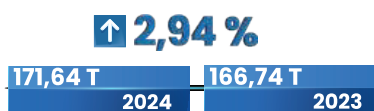
BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat



Perolehan Nilai Manfaat



Saldo Dana Haji



Instrumen Dana Haji 2023



Target vs Realisasi



Target vs Realisasi



Instrumen Dana Haji 2024



Dewan Pengawas

Ketua : Firmansyah N. Nazaroedin
Anggota : Deni Suardini
Anggota : Heru Muara Sidik
Anggota : M. Dawud Arif Khan
Anggota : Mulyadi
Anggota : Rojikin
Anggota : Hamka Hasan

Badan Pelaksana

Kepala : Fadul Imansyah
Anggota : Amri Yusuf
Anggota : Indra Gunawan
Anggota : Harry Alexander
Anggota : M. Arief Mufraini
Anggota : Sulistyowati
Anggota : Acep Riana Jayaprawira

Penghargaan

•Corporate Sustainability Award 2024 (CSA 2024)
•Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 - Silver Award
•Perhumas PR Excellence Awards 2024 (PREA) - Digital PR Program
•Anugerah ESG Republik 2024 - Environmental, Social, and Governance (ESG)
•7 Most Popular Brand Of The Year 2024
•Integrated Report Competition LACP - Gold & Platinum Winner
•SPS Serikat Perusahaan Pers (SPS) AWARDS 2024
•Barnas Award 2024 - Badan Pendukung Pengumpulan Zakat Terbaik

Jakarta, 30 Juli 2025
S. E. & O

Badan Pelaksana
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Fadul Imansyah
Kepala Badan Pelaksana

Amri Yusuf
Anggota Badan Pelaksana

Alamat Kantor BPKH
Muamalat Tower, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18,
Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

• @bpkhr | www.bpkh.go.id
• BPKH RI | Email: info@bpkh.go.id

TUJUH KALI BERTURUT RAIH WTP BPK



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menorehkan catatan prestasi gemilang. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, BPKH meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2024.

Capaian ini bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan dana haji terus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan syariah yang kuat.

Lebih dari Sekadar Angka

Opini WTP sendiri diberikan apabila laporan keuangan memenuhi empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keandalan sistem pengendalian internal, serta dukungan bukti transaksi yang valid.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-7 ini adalah bentuk penghargaan terhadap integritas dan komitmen BPKH dalam menjaga kepercayaan umat. Ini bukan semata soal angka, tapi soal amanah,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, dalam Media Briefing di kantor BPKH, Jakarta.

Senada dengan itu, Anggota BPKH, Amri Yusuf, menegaskan bahwa opini WTP adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada publik.

“Dana haji adalah dana umat yang jumlahnya sangat besar, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Dengan opini WTP, jemaah mendapat ketenangan bahwa dananya dikelola dengan baik, sesuai aturan, dan dapat dipercaya,” jelasnya.

Kinerja Keuangan 2024

Selain prestasi opini WTP, kinerja keuangan BPKH sepanjang 2024 juga mencatat





hasil positif. Dana kelolaan mencapai Rp171,64 triliun, melampaui target tahunan Rp169,95 triliun. Angka ini tumbuh 2,94% dibanding tahun 2023 yang berada di level Rp166,74 triliun.

Kenaikan juga tercermin dari peningkatan Penempatan Investasi Haji (PIH) yang tumbuh 2,98% dan Dana Abadi Umat (DAU) yang meningkat 1,05%.

Nilai Manfaat untuk Jemaah

Manfaat pengelolaan dana haji pun semakin dirasakan. Tahun 2024, nilai manfaat yang berhasil dihimpun mencapai Rp11,54 triliun, melampaui target Rp11,52 triliun. Angka ini tumbuh 5,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,92 triliun.

Dari total nilai manfaat tersebut, sebesar Rp8,1 triliun dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan haji 2024. Sementara itu, yield pengelolaan dana haji mencapai 6,97%, lebih tinggi dari target 6,78% dan meningkat dibanding tahun 2023 yang tercatat 6,72%. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi investasi berbasis syariah yang adaptif di tengah dinamika pasar.

Prinsip Amanah

Pencapaian ini menegaskan kembali komitmen BPKH untuk terus memperkuat ekosistem keuangan syariah dan tata kelola dana haji yang modern, transparan, serta berbasis digital. Sejak awal berdiri, BPKH menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi pengelolaan.

“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa dana haji harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi. Laporan keuangan adalah cermin dari sejauh mana amanah itu dijalankan, dan bagi kami hal ini tidak bisa ditawar,” tegas Fadlul.

Ke depan, BPKH berkomitmen untuk menjaga konsistensi kinerja dan integritasnya, agar dana umat tidak hanya aman, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi keberlangsungan ibadah haji di Indonesia.

BPKH APPS

Kamu udah download
BPKH Apps belum?



Cek saldo dan pertumbuhan nilai
manfaat kamu hanya di **BPKH Apps!**

Haji Makin Transparan Dan Mudah

Dengan BPKH Apps, dana haji kamu aman, transparan,
dan bisa dipantau kapan saja. Berikut fitur-fitur di
dalam BPKH Apps:



1. Dashboard Dana Haji
Menampilkan ringkasan informasi dana
haji secara real-time.



2. Cek Saldo Virtual Account
Melihat pertumbuhan Nilai Manfaat yang
kamu dapatkan



**3. Laporan Kinerja dan Pengelolaan
Dana Haji**
Menyediakan laporan berkala pengelolaan
keuangan haji oleh BPKH.



**4. Notifikasi Terbaru dan Tautan ke
Situs Resmi BPKH**
Memberikan info terkini seputar haji serta
akses cepat ke portal resmi, layanan
pengaduan, atau informasi tambahan.

Amri Yusuf

S.E., Ak., CA., M.M., CACP

Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP. adalah Anggota Badan Pelaksana BPKH periode 2022-2027. Ia menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, dan Universitas Indonesia. Dengan pengalaman luas di bidang akuntansi, manajemen keuangan, serta tata kelola perusahaan, Amri dikenal sebagai sosok yang ahli dalam mengoptimalkan sumber daya, mengelola risiko, dan memperkuat sistem kontrol internal. Keahliannya kini ia dedikasikan untuk memperkuat pengelolaan dana haji di BPKH.

MENJAGA AMANAH, MENGUATKAN KEPERCAYAAN

PERJALANAN BPKH MERAIH OPINI WTP

Setiap tahun, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyusun laporan keuangan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari proses inilah lahir sebuah penilaian penting yang menjadi tolok ukur tata kelola lembaga: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bagi sebagian orang, istilah itu mungkin terdengar teknis. Namun bagi BPKH, WTP bukan sekadar predikat akuntansi, melainkan simbol akuntabilitas, transparansi, dan yang paling utama ialah kepercayaan umat.

“Opini WTP adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Dana haji adalah dana umat yang jumlahnya sangat besar, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Dengan opini WTP, jamaah mendapat ketenangan bahwa dananya dikelola dengan baik, sesuai aturan, dan dapat dipercaya,” ujar Amri Yusuf, Anggota Badan Pelaksana BPKH periode 2022–2027, yang ditemui redaksi *e-magazine* BPKH dalam sebuah wawancara.

Sebagai badan hukum publik BPKH juga diberi amanah secara reguler untuk melaporkan keuangan audit kepada Presiden dan DPR paling lambat setiap tanggal 30 Juni tahun berikutnya

serta menyampaikan Laporan Keuangan publikasi di minimal dua media nasional paling lambat tgl 31 Juli thn berikutnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi.

Bagi Amri, hal ini tidak bisa ditawar. Laporan keuangan adalah cermin dari sejauh mana amanah itu dijalankan. Opini WTP sendiri diberikan jika laporan keuangan memenuhi empat kriteria utama: sesuai dengan standar akuntansi, mengikuti ketentuan perundangan, lahir dari sistem kontrol internal yang terpercaya, serta didukung bukti transaksi yang valid.

“Semua syarat itu harus dipenuhi. Jadi ketika BPK memberikan opini WTP, itu artinya sistem pengelolaan keuangan kita sudah berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Namun, perjalanan menuju WTP bukan hal yang mudah.

Mengelola laporan keuangan dana haji berarti berurusan dengan ribuan transaksi yang melibatkan lintas unit, mulai dari setoran jamaah, kerja sama dengan perbankan, hingga koordinasi dengan Kementerian Agama.

Amri mengakui, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara akurasi dan kecepatan. “Kalau kita hanya mengejar akurasi, laporan bisa jadi lambat keluar. Sebaliknya, kalau hanya mengejar kecepatan, akurasinya bisa terkorbankan. Di sinilah seni mengelola laporan keuangan: menemukan titik keseimbangan antara keduanya,” ungkapnya.

Untuk itu, tim keuangan BPKH selalu menjaga ritme kerja dengan melakukan rekonsiliasi data secara rutin bersama pihak-pihak terkait. Setiap angka diperiksa berlapis, setiap dokumen diverifikasi, agar laporan yang disajikan tidak hanya



cepat tetapi juga bisa dipercaya. Opini WTP juga mencerminkan lebih dari sekadar kualitas angka. Ia adalah simbol tata kelola yang baik (*good governance*).

Publik, pengamat, DPR, hingga jamaah haji melihat WTP sebagai indikator utama akuntabilitas BPKH. Sistem pengawasan berlapis memastikan kepercayaan itu terjaga: mulai dari audit internal, pengawasan Dewan Pengawas, pengawasan DPR melalui rapat kerja, hingga audit independen BPK.

“WTP merepresentasikan tingkat kepercayaan publik. Dengan pengawasan berlapis, kami memastikan laporan keuangan benar-benar berkualitas, transparan, dan akuntabel,” tegas Amri.

Meski berhasil meraih opini WTP, BPKH tidak berhenti pada pencapaian itu. Menurut Amri, justru ada komitmen besar untuk terus melakukan perbaikan. Langkah ke depan diarahkan pada transformasi digital. BPKH tengah menyiapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih cepat, terintegrasi, dan real-time. Melalui dashboard digital, pimpinan dapat memantau perkembangan investasi, setoran jamaah, hingga realisasi penggunaan anggaran setiap saat.

“Informasi keuangan itu penting untuk pengambilan keputusan. Semakin cepat data tersedia, semakin baik pula keputusan yang bisa diambil. Karena itu, kami ingin laporan keuangan BPKH ke depan tidak hanya akurat, tapi juga real-time,” jelasnya.

Selain itu, sistem *internal control* akan terus diperkuat melalui pembaruan SOP, verifikasi berjenjang, hingga audit internal independen. Semua ini dilakukan agar kualitas laporan tetap terjaga, sekaligus meminimalisir risiko salah saji.

Bagi BPKH, opini WTP adalah prestasi, tetapi bukan tujuan akhir. Target yang lebih besar adalah menjaga kepercayaan umat.

Amri menegaskan, BPKH ingin mempertahankan WTP di tahun-tahun mendatang sambil terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya. “Kami berterima kasih kepada BPK yang selain melakukan audit juga banyak memberikan masukan yg bersifat membangun dalam

rangka penguatan sistem tata kelola pelaporan keuangan. Harapan kami, perbaikan terus dilakukan agar tata kelola dana haji semakin kuat,” katanya.

Baginya, transparansi bukan hanya soal memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga tentang merawat amanah. “Dana haji ini adalah titipan jutaan jamaah. Amanah ini tidak boleh dikhianati.

Setiap angka dalam laporan keuangan adalah cermin dari tanggung jawab kami kepada umat,” tutup Amri.



Nilai Manfaat Tahun 2025 Sudah Didistribusikan!

BPKH sudah mendistribusikan nilai manfaat tahap pertama tahun 2025 untuk Jemaah Tunggu

Nilai manfaat dan saldo dana haji
dapat di cek melalui BPKH Apps

Download BPKH Apps segera!

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store





HAJJ MOMENT

THE BEST EXECUTION WINNER IN GOVERNMENT SECTOR SPECIAL RECOGNITION



OUTSTANDING PERFORMANCE IN OVERSEAS DEVELOPMENT FOR CUSTOMER EXPERIENCE



DANA HAJI: TETAP DI BPKH, PERKUAT TRANSPARANSI DAN KELEMBAGAAN

Ketika dana umat dipertaruhkan, transparansi menjadi harga mati. Dari Muhammadiyah hingga KPK dan MUI, suara bulat: pisahkan fungsi, perkuat lembaga.

Wacana revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji kembali mengemuka. Isu ini memantik beragam tanggapan dari tokoh masyarakat, lembaga antikorupsi, hingga organisasi keagamaan. Inti perdebatan mengerucut pada satu hal: bagaimana menjaga kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana haji yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menegaskan bahwa pengelolaan dana sebaiknya tetap berada di bawah kendali Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pemisahan fungsi antara pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji yang berlaku saat ini justru lebih sehat bagi sistem tata kelola.

“Lebih baik dipisah seperti sekarang.

Kemandirian BPKH betul-betul harus dijunjung tinggi karena ini menyangkut dana yang sangat penting,” ujar Anwar di Jakarta, Kamis (5/6/2025). Ia mengingatkan agar hasil investasi dana haji dimanfaatkan untuk subsidi biaya keberangkatan jemaah, tanpa menyentuh dana pokok setoran calon jemaah. “Kalau pokok sampai terpakai, itu jelas bertentangan dengan undang-undang. Jadi hanya hasil pengelolaan yang boleh digunakan,” tegasnya.

KPK: Pisahkan Fungsi, Perkuat Check and Balance

Nada serupa datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plt Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menilai pemisahan fungsi antara penyelenggara teknis haji dan pengelola keuangan merupakan langkah strategis. Tujuannya: memperkuat check and balance antar lembaga sekaligus menutup celah konflik kepentingan.

“Harapannya bukan memperpanjang birokrasi, justru dengan pemisahan itu mekanisme kontrol menjadi lebih efektif,” ujarnya (31/7/2025). KPK menekankan

agar BPKH tetap fokus pada pengelolaan dana secara profesional dan transparan, sementara Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) berperan di tataran operasional. Dengan begitu, potensi tumpang tindih maupun intervensi kewenangan dapat ditekan.

Lebih jauh, KPK menegaskan perlunya seleksi pejabat di kedua lembaga tersebut berbasis integritas, profesionalisme, dan bebas dari afiliasi politik. “Yang duduk di BPH maupun BPKH harus dipilih karena kapasitas dan komitmen terhadap pelayanan publik, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan,” tegas Aminuddin.

MUI: Perkuat Kelembagaan BPKH

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan BPKH. Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menilai posisi BPKH dalam ekosistem keuangan haji perlu ditopang secara kelembagaan maupun regulatif.

“Dulu saat digabungkan, banyak masalah yang muncul. Jadi pemisahan ini sudah tepat. Sekarang yang perlu adalah memperkuat kewenangan BPKH dengan dukungan DPR dan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis (29/7/2025).

MUI bahkan mendorong adanya mekanisme pengawasan syariah yang lebih kokoh. Tujuannya agar pengelolaan dana tidak hanya sesuai aturan perundangan, tetapi juga selaras dengan prinsip-

prinsip syariah yang menjadi ruh pengelolaan dana umat.

Menatap Masa Depan Pengelolaan Dana Haji

Dari berbagai pandangan tersebut, benang merah yang muncul adalah pentingnya mempertahankan pemisahan fungsi dan memperkuat BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji yang independen, profesional, dan transparan. Dukungan dari Muhammadiyah, KPK, dan MUI memperlihatkan kesamaan visi: dana umat harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, tidak boleh tergerus pokoknya, dan dijalankan oleh lembaga yang kredibel.

Kini, bola berada di tangan pemerintah dan DPR yang tengah menggodok revisi undang-undang. Apakah penguatan BPKH benar-benar menjadi prioritas? Atau justru arah kebijakan baru akan membuka babak perdebatan yang lebih panjang?

Satu hal yang pasti, kepercayaan publik adalah modal utama. Tanpa transparansi dan integritas, sebesar apa pun dana yang dikelola, risikonya tidak hanya pada keberlanjutan ibadah haji, tetapi juga pada hilangnya kepercayaan umat.

“Lebih baik dipisah seperti sekarang. Kemandirian BPKH betul-betul harus dijunjung tinggi karena ini menyangkut dana yang sangat penting,”





BPKH SALURKAN NILAI MANFAAT 2025: RP2,1 TRILIUN UNTUK 5,4 JUTA JEMAAH HAJI TUNGGU

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menegaskan perannya sebagai pengelola dana umat dengan menyalurkan nilai manfaat tahap pertama tahun 2025 kepada lebih dari 5,4 juta jemaah haji tunggu. Total nilai manfaat yang dibagikan mencapai Rp2,1 triliun, sebuah angka yang menjadi bukti konkret optimalisasi dana haji.

Rincian distribusi itu terdiri dari:

- Rp1,9 triliun untuk jemaah haji reguler, dengan rata-rata manfaat sebesar Rp366,2 ribu per jemaah.
- USD 9,2 juta untuk jemaah haji khusus, dengan rata-rata manfaat USD 72 per jemaah.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyebut penyaluran ini merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dipegang teguh lembaganya. “Kami terus berupaya agar dana kelolaan jemaah haji dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Tidak hanya menopang pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga menghadirkan nilai manfaat yang bisa langsung dirasakan jemaah tunggu,” ujarnya.

Transparansi dan Prinsip Syariah

Lebih dari sekadar angka, distribusi nilai manfaat ini menegaskan komitmen BPKH terhadap transparansi, akuntabilitas, dan prinsip syariah. Seluruh dana yang disalurkan berasal

dari hasil investasi yang dikelola dengan pendekatan prudent dan berlandaskan kaidah syariah, tanpa mengurangi dana pokok setoran jemaah.

“Kami pastikan nilai manfaat dibagikan secara adil dan sesuai prinsip syariah, serta dapat dipantau secara terbuka oleh



Jemaah Haji Reguler

Kategori	Jumlah Jemaah	Min NMVA	Avg NMVA	Max NMVA	Total Terdistribusi
Lunas Tunda	2.430,00	379.104,34	692.332,34	861.857,39	1.682.367.596,27
Waitinglist	5.301.235,00	1.925,30	366.238,88	735.611,79	1.941.518.358.491,82
Lain-lain	209,00	18.381,62	154726,85	210.693,33	32.337.910,91
Total	5.303.874,00				1.943.233.063.999,00

Catatan: Rate VA = 1,39% (ekuivalen 2,79% p.a)

Jemaah Haji Khusus

Kategori	Jumlah Jemaah	Min NMVA	Avg NMVA	Max NMVA	Total Terdistribusi
Lunas Tunda	1.833,00	79,46	166,84	172,23	305.822,00
Waitinglist	128.703,00	0,41	72,05	152,35	9.273.373,86
Lain-lain	352,00	6,22	75,77	105,27	26.671,67
Total	130.888,00				9.605.867,53

Catatan: Rate VA = 1,87% (ekuivalen 3,74% p.a)

jemaah melalui kanal digital seperti aplikasi BPKH Apps,” tambah Fadlul.

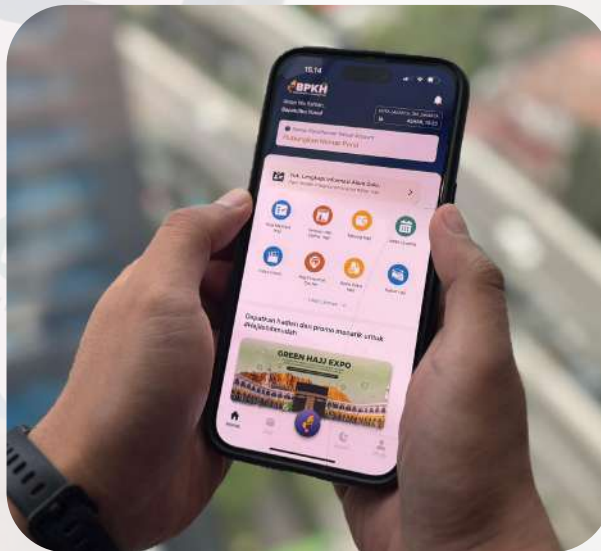
Akses Mudah untuk Jemaah

Untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, BPKH mengimbuai seluruh jemaah tunggu agar memverifikasi data melalui kanal resmi. Kehadiran aplikasi digital menjadi jembatan bagi jemaah untuk memantau manfaat yang diterima, sekaligus bentuk adaptasi BPKH terhadap tuntutan transparansi di era digital.

Menjaga Kepercayaan Publik

Dengan total kelolaan dana haji yang sangat besar, distribusi nilai manfaat ini tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik. Setiap rupiah yang dikembalikan kepada jemaah adalah bukti bahwa dana umat dikelola secara profesional dan produktif.

Langkah ini sekaligus menguatkan posisi BPKH sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan amanah undang-undang, tetapi juga membangun narasi baru: dana haji bukan hanya menunggu keberangkatan, melainkan juga memberikan manfaat nyata sejak hari pertama disetor.



Semua BisaHaji
80 Beresita Berprestasi Tahun ke-80 Indonesia Haji
BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji

Nilai Manfaat Tahun 2025 Sudah Didistribusikan!

BPKH sudah mendistribusikan nilai manfaat tahap pertama tahun 2025 untuk Jemaah Tunggu

Nilai manfaat dan saldo dana haji dapat di cek melalui BPKH Apps

Download BPKH Apps segera!

bpkh
 www.bpkh.go.id



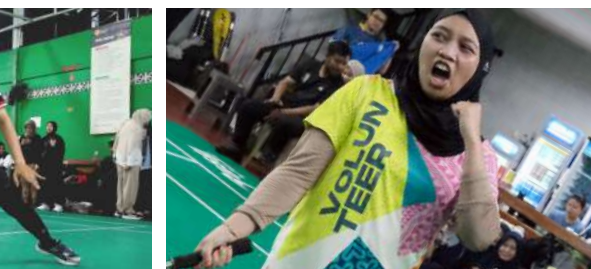
SEMARAK KEMERDEKAAN HUT KE-80 RI DI BPKH

Menggelar rangkaian kegiatan mulai dari Upacara Kemerdekaan, Karnaval penuh warna, hingga perlombaan seru yang mempererat kebersamaan Insan BPKH. Semangat kemerdekaan terasa nyata, membawa energi baru untuk terus berkarya bagi negeri.











KELOLA DANA HAJI RP170 TRILIUN, BPKH TEGASKAN AMAN DAN TRANSPARAN

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan dana haji yang kini mencapai Rp170 triliun (per Juli 2025) berada dalam kondisi aman. Anggota Dewan Pengawasan BPKH, Mulyadi, menekankan bahwa dana tersebut murni titipan jemaah dan sama sekali tidak digunakan untuk program pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Dana haji adalah dana publik, bukan APBN. Saat ini dana BPKH Rp170 triliun, dan tidak ada satu pun yang dialokasikan untuk IKN,” ujarnya di Universitas

Sebelas Maret, Solo (17/7/2025).

Fokus pada Keamanan dan Manfaat

Mandat utama BPKH adalah menjaga dana setoran awal jemaah—senilai Rp25 juta per orang—sekaligus mengoptimalkan manfaat dari hasil investasinya. Saat ini, sekitar Rp40 triliun ditempatkan di lebih dari 30 bank syariah dalam bentuk deposito, sementara sebagian besar sisanya ditanamkan dalam surat berharga syariah yang dijamin Kementerian Keuangan.

“Subsidi bagi jemaah yang berangkat bukan dari dana pokok, tetapi dari imbal hasil investasi yang per tahun mencapai Rp10–11 triliun,” jelas Mulyadi. Sebagian return itu diberikan kepada jemaah yang berangkat, sebagian lain kepada jemaah yang masih menunggu lewat virtual account.

Transparansi Jadi Kunci

Untuk menjamin akuntabilitas, pengelolaan dana haji diawasi DPR dan diaudit langsung oleh BPK. “Kami ingin masyarakat yakin, dana jemaah dikelola dengan aman, transparan, dan berbasis syariah,” tegas Mulyadi.

Optimalisasi Dana Haji: Dari Imbal Hasil ke Investasi Strategis

Pengelolaan dana haji tidak semata urusan keuangan, melainkan amanah besar yang menyangkut

kepercayaan umat. Karena itu, diskusi tentang strategi investasi BPKH semakin relevan di tengah tantangan ekonomi global.

Tantangan Investasi

Moderat

Hingga kini, porsi terbesar dana ditempatkan di instrumen berisiko rendah: 60% di sukuk negara, 25% di deposito syariah, dan hanya 10% di saham syariah. Skema ini memang aman, tetapi berisiko tertinggal menghadapi inflasi dan kenaikan biaya haji. Beberapa kalangan merekomendasikan porsi ekuitas bisa ditingkatkan hingga 40%, tentu dengan prinsip kehati-hatian syariah.

Diversifikasi Syariah dan Peran Global

BPKH juga didorong memperluas diversifikasi, termasuk global sukuk, Islamic equity funds, Islamic REITs, hingga infrastruktur sukuk. Selain memberi imbal hasil jangka panjang, instrumen ini mendukung pembangunan berbasis syariah dan berkelanjutan.

Keberhasilan Tak Hanya Soal Angka

Ukuran keberhasilan BPKH tidak semata pada laporan return, melainkan juga kualitas pelayanan jemaah. Investasi pada ekosistem haji—seperti pengembangan layanan digital hingga BPKH Limited di Arab Saudi—perlu terus diperkuat.

Momentum Revisi Regulasi

Revisi UU No.8/2019 yang kini dibahas DPR memberi peluang untuk memperkuat posisi kelembagaan BPKH, termasuk dalam penentuan biaya haji dan investasi strategis.



Pengelolaan dana haji adalah amanah umat. Dengan strategi yang lebih dinamis, BPKH bisa tampil bukan hanya sebagai pengelola dana, tetapi sebagai investor syariah yang menjaga kepercayaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi jemaah.





BPKH DUKUNG PEMBANGUNAN ASRAMA PESANTREN DI BANDUNG LEWAT PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui program kemaslahatan umat menggandeng DPR RI dan BAZNAS untuk mewujudkan pembangunan gedung asrama baru di pesantren tersebut. Sebuah langkah nyata yang menunjukkan bahwa dana haji tidak berhenti pada penyelenggaraan ibadah, melainkan berputar kembali memberi manfaat bagi umat di tanah air.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang juga tumbuh bersama pesantren, menyampaikan dengan lantang bahwa paradigma lama tentang pesantren kumuh harus segera ditinggalkan. “Santri kita tidak boleh lagi hidup dengan fasilitas seadanya. Pesantren harus nyaman, bersih, dan bermartabat,” ujarnya, penuh keyakinan.

Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama. Ia adalah kawah candradimuka, di mana nilai kejujuran, kesederhanaan, dan ketekunan ditempa. Karena itu, fasilitas layak bagi para santri bukan sekadar urusan fisik, melainkan bagian dari mencetak generasi yang sehat jasmani dan rohani.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyebut penyaluran dana abadi umat untuk pembangunan ini sebagai wasilah penting. “Asnaf-nya jelas, masuk dakwah dan pemberdayaan umat. Kami

berharap asrama ini melahirkan generasi Islam yang berakhlak dan bermanfaat bagi bangsa,” tuturnya.

Hal serupa ditegaskan oleh Rizaludin Kurniawan dari BAZNAS. Setelah meninjau langsung, ia yakin pesantren ini layak dibantu. “Asrama yang baik akan membuat santri lebih nyaman belajar, lebih sehat, dan insya Allah memberi manfaat jangka panjang,” katanya.

Di tengah tantangan zaman, sinergi antara negara, lembaga keuangan umat, dan pesantren menjadi jawaban. Bukan hanya pembangunan gedung, tapi juga pembangunan harapan: bahwa pesantren dapat terus menjadi pusat peradaban, melahirkan generasi religius yang sehat, produktif, dan siap memberi warna bagi bangsa.





BPKH DAN BAZNAS RESMIKAN GEDUNG SERBAGUNA UNTUK PONPES ASSYAFI'YYAH MAJALENGKA

Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, sebuah gedung serbaguna kini berdiri di tengah kompleks Pondok Pesantren Assyafi'iyah. Bangunan yang baru saja diresmikan pada Sabtu (12/7/2025) itu bukan hanya tumpukan bata dan semen, melainkan simbol hadirnya kepedulian—buah dari kolaborasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Fasilitas ini dirancang untuk menjadi pusat kegiatan santri: tempat belajar, beribadah, hingga ruang untuk menggerakkan aktivitas masyarakat. Lebih dari sekadar ruang, ia diharapkan menjadi jantung baru bagi kehidupan pesantren yang selama ini setia mendidik generasi muda dengan nilai keilmuan dan keislaman.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA, menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga adalah bukti nyata bahwa dana umat bisa kembali kepada umat dalam bentuk yang relevan. “Bantuan ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di pesantren dan menjadi pusat kegiatan yang produktif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

“Kami bersyukur bisa bersinergi dengan BAZNAS dalam mewujudkan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh santri. Semoga gedung ini menjadi sarana ibadah, belajar, dan tumbuhnya generasi yang unggul dan berakhlak,”

Senada, Pimpinan BPKH Dr. Sulistyowati, M.E., CFP menyebut pembangunan gedung ini sebagai wujud amanah pengelolaan dana haji yang membawa manfaat luas. “Semoga gedung ini menjadi sarana ibadah, belajar, dan tumbuhnya generasi unggul berakhlak,” katanya.

Bagi pengasuh dan keluarga besar pesantren, kehadiran gedung ini adalah jawaban dari doa panjang. Ase Busrol Munawwar, Pembina Yayasan Pondok Pesantren Assyafi'iyah, tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. “Gedung ini akan sangat bermanfaat bagi para santri, guru, dan kegiatan sosial keagamaan kami. Semoga keberkahan terus mengalir bagi semua pihak yang terlibat,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, gedung ini menjadi penanda penting: bahwa pesantren hari ini tidak boleh lagi dipandang sebagai lembaga yang kumuh dan tertinggal. Pesantren adalah pusat pemberdayaan, tempat lahirnya generasi religius yang siap berkontribusi untuk bangsa. Dan setiap batu yang disusun dalam gedung ini adalah bagian dari fondasi kemaslahatan umat yang lebih luas.



BPKH DAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) PERKUAT EKONOMI SYARIAH NASIONAL

Resmikan Pembangunan Islamic Economics and Business Center di UNS Solo

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo secara resmi memulai pembangunan Islamic Economics and Business Center di lingkungan kampus UNS Solo, Jawa Tengah hari ini.

Pembangunan ini menandai tonggak penting dalam upaya penguatan pendidikan, kajian akademik, pengabdian, serta praktik ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia.

Peletakan batu pertama dilakukan sebagai simbol komitmen BPKH dalam mendukung pendidikan, pengembangan ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas BPKH, Dr. Mulyadi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Program Kemaslahatan BPKH yang dibiayai dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU), bukan dari dana setoran awal jemaah haji.

“Saat ini, BPKH mengelola sekitar Rp3,9 triliun Dana Abadi Umat yang diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen syariah. Pokok dananya tidak digunakan, namun nilai manfaatnya kami salurkan untuk mendukung program-program kemaslahatan di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan pusat studi ekonomi Islam ini yang masuk ke dalam asnaf Pendidikan dan Dakwah yang akan menjadi bagian dalam membangun masyarakat di Indonesia,” jelas Dr. Mulyadi.



Komitmen Cetak Talenta Ekonomi Islam

Pusat studi ini diharapkan menjadi wadah pengembangan pendidikan keilmuan dan keterampilan praktis di bidang ekonomi dan bisnis syariah.

Program-program yang ditawarkan dirancang untuk mencetak talenta dan pelaku ekonomi yang kompeten dan mampu menjawab tantangan ekonomi global melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang berdampak bagi kemajuan bangsa Indonesia.

“Selain itu, Islamic Economics and Business Center juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep-konsep ekonomi dan bisnis syariah, guna mendorong penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, baik dalam skala individu maupun komunitas,” ujar Dr. Mulyadi.

Dr. Mulyadi optimis bahwa sinergi antara BPKH dan UNS akan terus berlanjut dan berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian serta mencetak generasi pemimpin dan pelaku ekonomi dan bisnis syariah yang unggul dan berintegritas yang pada akhirnya memajukan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si., menyambut antusias pembangunan Islamic Economics and Business Center di kampus UNS, Solo.

Dalam pernyataannya, Prof. Hartono menyebut pembangunan gedung ini sebagai sebuah amanah

besar yang telah lama dinantikan oleh sivitas akademika dan masyarakat luas di Indonesia.

“Ini adalah gedung yang dinanti-nantikan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berkenan untuk berperan dalam merealisasikan gedung Islamic Economics and Business Center di UNS,” ujarnya.

Menurut Prof. Hartono, gedung ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan simbol dari harapan dan cita-cita besar yang berdampak bagi masyarakat Indonesia dan harus dijaga bersama.

“Kami menyambut baik amanah yang luar biasa ini, yang wajib kita jaga bersama. Ini merupakan yang pertama dan harapannya dapat menjadi contoh. Gedung

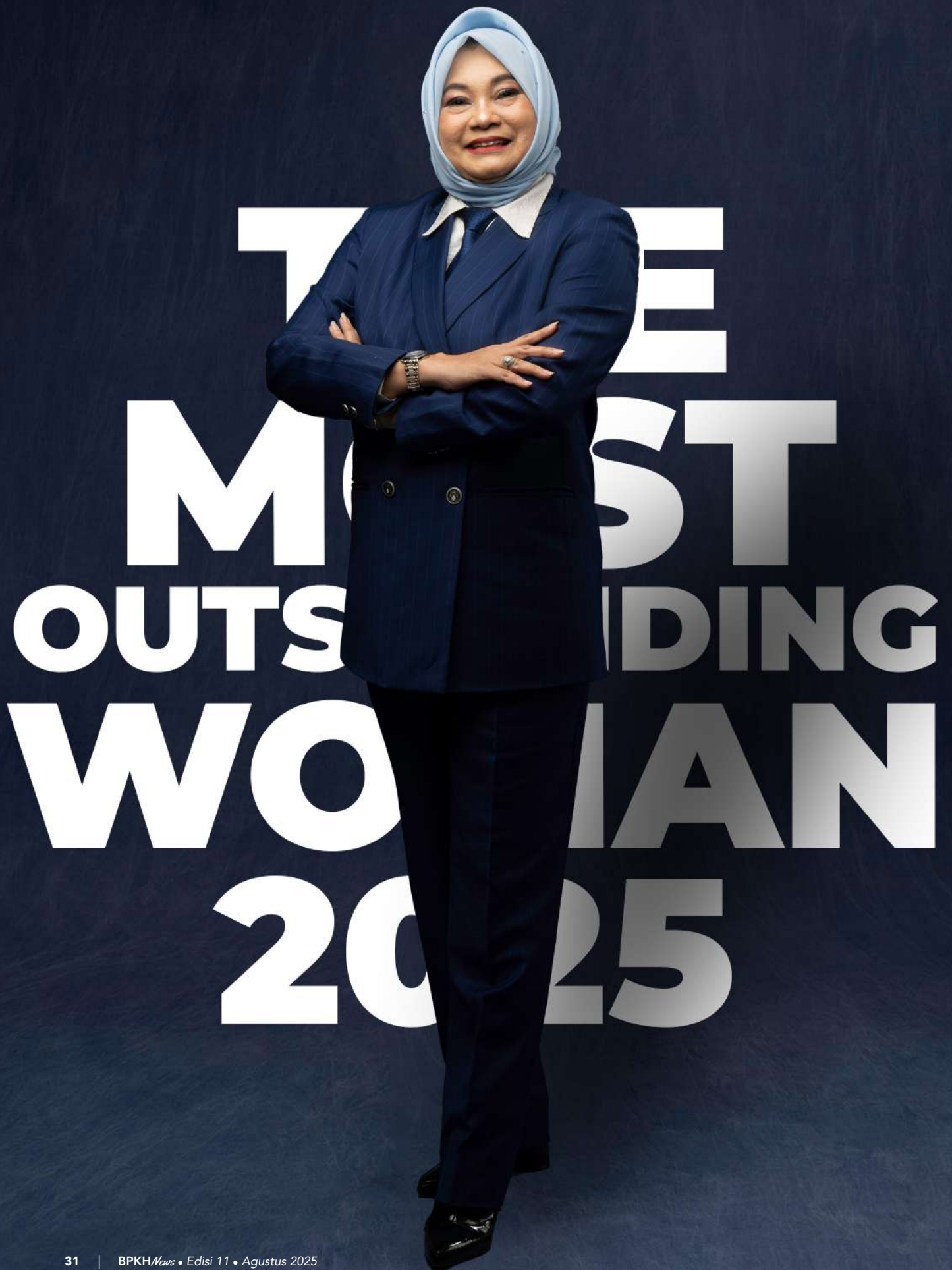
ini tidak hanya berdiri sebagai gedung saja, tetapi betul-betul aktivitas di dalamnya dapat memberikan manfaat kepada UNS, masyarakat sekitar, bangsa dan negara, khususnya umat Muslim dan perkembangan ekonomi dan bisnis Islam,” tandas Prof. Hartono.

Pembangunan Islamic Economics and Business Center ini merupakan wujud nyata sinergi antara UNS dan BPKH dalam mendorong pengembangan dan memajukan masyarakat Indonesia yaitu melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam menerapkan ilmu ekonomi dan bisnis syariah yang berkelanjutan, aplikatif, dan berdampak.

“Pusat studi ini termasuk dalam asnaf pendidikan dan dakwah, yang akan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat.”

Program Kemasyarakatan BPKH Tahun 2025







KIPRAH PEREMPUAN UNTUK KEUANGAN SYARIAH BERKELANJUTAN

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Salah satu Anggota Badan Pelaksana BPKH, Dr. Sulistyowati, M.E., CFP., meraih penghargaan bergengsi *The Most Outstanding Woman 2025* dari Infobank.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi beliau dalam mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang akuntabel, amanah, dan profesional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas komitmen BPKH untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah haji serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Sosok di Balik Prestasi

Dr. Sulistyowati menjabat sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH periode 2022–2027. Beliau merupakan pakar di bidang ekonomi Islam, keuangan, dan manajemen perbankan dengan pengalaman luas di industri keuangan syariah.

Pendidikan tinggi beliau ditempuh di Universitas Trisakti, di mana ia meraih gelar doktor dan magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Islamic Economic & Finance. Sebelumnya, beliau menuntaskan pendidikan sarjana di bidang Manajemen di Universitas Gadjah Mada.

Kontribusi Nyata untuk Keuangan Syariah

Sepanjang kariernya, Dr. Sulistyowati telah memegang berbagai posisi strategis di lembaga keuangan dan pemerintahan. Keahliannya meliputi pengembangan layanan keuangan syariah, pengelolaan dana investasi, hingga pembiayaan korporasi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi umat.

Dedikasinya tercermin dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana haji melalui prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Inovasi yang beliau dorong tidak hanya memperkuat kinerja BPKH, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Inspirasi Perempuan Indonesia

Penghargaan *The Most Outstanding Woman 2025* ini menjadi simbol bahwa kepemimpinan perempuan dapat memberi kontribusi signifikan dalam sektor strategis. Dengan integritas, visi, dan komitmen yang kuat, Dr. Sulistyowati menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk berkiprah aktif dalam membangun keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Prestasi ini bukan hanya milik beliau pribadi, tetapi juga bagian dari perjalanan kolektif BPKH dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan membangun kepercayaan publik.

PESONA TIGA MASJID IKONIK NUSANTARA

Indonesia tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kekayaan arsitektur masjid yang memadukan nilai estetika, filosofi, dan fungsi ibadah. Dari barat hingga timur, setiap masjid memiliki cerita unik, baik dari sejarah pendirian, makna desain, maupun peran sosialnya bagi masyarakat. Berikut adalah tiga masjid yang menjadi ikon di daerahnya masing-masing.

Masjid Al Irsyad Satya – Simbol Kesederhanaan yang Modern di Bandung Barat

Di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, berdiri megah Masjid Al Irsyad Satya. Sekilas, bangunan ini tampak berbeda dari masjid pada umumnya. Tidak memiliki kubah, bentuknya menyerupai kubus dengan dinding berongga. Desain ini bukan tanpa alasan, arsitek Ridwan Kamil merancang untuk menghadirkan kesan modern, minimalis, sekaligus sarat makna.



Dinding masjid yang berlubang membentuk lafaz dua kalimat syahadat berfungsi sebagai ventilasi alami. Sirkulasi udara yang lancar membuat ruang ibadah tetap sejuk meski tanpa pendingin ruangan. Mihrab terbuka yang langsung menghadap ke alam menciptakan suasana ibadah yang teduh dan kontemplatif.

Bagian langit-langit dihiasi 99 kotak lampu. Saat malam, cahaya yang memancar membentuk Asmaul Husna, menghadirkan suasana yang syahdu. Dibangun di lahan hampir dua hektare dan diresmikan pada 2010, masjid ini menjadi bagian integral dari Al Irsyad Satya Islamic School.

Meski berdesain sederhana dengan dominasi warna putih, hitam, dan abu-abu, keanggunannya memikat banyak pengunjung. Pada bulan Ramadan, masjid ini menjadi magnet jamaah dari berbagai daerah yang ingin merasakan nuansa ibadah di tengah arsitektur yang unik.

Masjid Agung An-Nur – Taj Mahal Versi Riau

Pekanbaru memiliki sebuah mahakarya arsitektur Islam yang kerap dijuluki “Taj Mahal-nya Indonesia”—Masjid Agung An-Nur. Dibangun pada 1963, masjid ini menjadi salah satu saksi sejarah berdirinya Provinsi Riau. Arsitekturnya memadukan unsur Melayu, Turki, Arab, dan India.



Keunikan paling menonjol ada pada kubah utama yang berbentuk gasing terbalik, terinspirasi dari permainan tradisional Melayu. Bentuk ini tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga ciri khas yang membedakan Masjid An-Nur dari masjid-masjid besar lainnya di Indonesia.

Masjid ini berdiri di atas lahan 12,6 hektare, dengan halaman luas yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan. Eksteriornya didominasi warna hijau, sedangkan interior memadukan hijau, putih, dan kaligrafi emas yang memberikan kesan megah.

Saat Ramadan, kawasan masjid menjadi pusat aktivitas warga—mulai dari tadarus, berbuka bersama, hingga ngabuburit sambil menikmati suasana sore. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dan simbol kebanggaan masyarakat Riau.

Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center – Permata di Pulau Seribu Masjid

Lombok dijuluki “Pulau Seribu Masjid” karena hampir setiap lingkungan memiliki rumah ibadah umat Islam. Di antara ribuan masjid tersebut, Islamic Center Hubbul Wathan di Mataram menjadi yang paling menonjol, baik dari segi skala maupun kemegahan.

Dibangun mulai 2010 dan diresmikan pada 2013, kompleks masjid ini berdiri di atas lahan seluas 7,76 hektare. Bangunannya berlantai empat, dilengkapi lima menara, dengan menara utama setinggi 99 meter sebagai simbol 99 Asmaul Husna.



Kubah utamanya memiliki motif Batik Sasambo—akronim dari Sasak, Sumbawa, dan Mbojo—yang menjadi representasi persatuan tiga suku besar di NTB. Saat malam hari, kubah ini memancarkan cahaya yang indah, membuatnya tampak seperti permata di tengah kota.

Islamic Center Hubbul Wathan tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga destinasi wisata religi yang terbuka untuk wisatawan, termasuk non-Muslim, dengan ketentuan berpakaian sopan. Pengunjung dapat menikmati kemegahan arsitektur, memotret sudut-sudut indah, atau sekadar menikmati suasana religius yang menyatu dengan keramahan warga Lombok.

Di sekitar area masjid, deretan pedagang kaki lima menjajakan kuliner lokal seperti es cendol segar yang menjadi favorit wisatawan. Perpaduan warna putih, kuning, dan toska, ditambah sentuhan detail keemasan di dinding dan tiang, menciptakan nuansa Timur Tengah yang megah.

Ketiga masjid ini membuktikan bahwa rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat melaksanakan ritual keagamaan, tetapi juga karya seni, pusat interaksi sosial, dan destinasi wisata budaya. Dari desain kubus minimalis di Bandung Barat, kubah gasing terbalik di Pekanbaru, hingga kemegahan Batik Sasambo di Mataram—masjid-masjid ini menjadi bukti harmoni antara arsitektur, budaya, dan spiritualitas di Indonesia.

BUKA SUARA TUANG GAGASAN

Kami mengundang anda membuka suara, menuang gagasan. Tunjukkan pandangan, bergerak bersama lewat kata.

Redaksi menerima tulisan-tulisan :

1. Opini & refleksi
2. Tema sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya.
3. Karya orisinal yang belum pernah dipublikasikan.

kiriman karyamu ke:
info@bphk.go.id
atau
humas@bphk.go.id

subjek: Judul Tulisan_Nama Anda





Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940